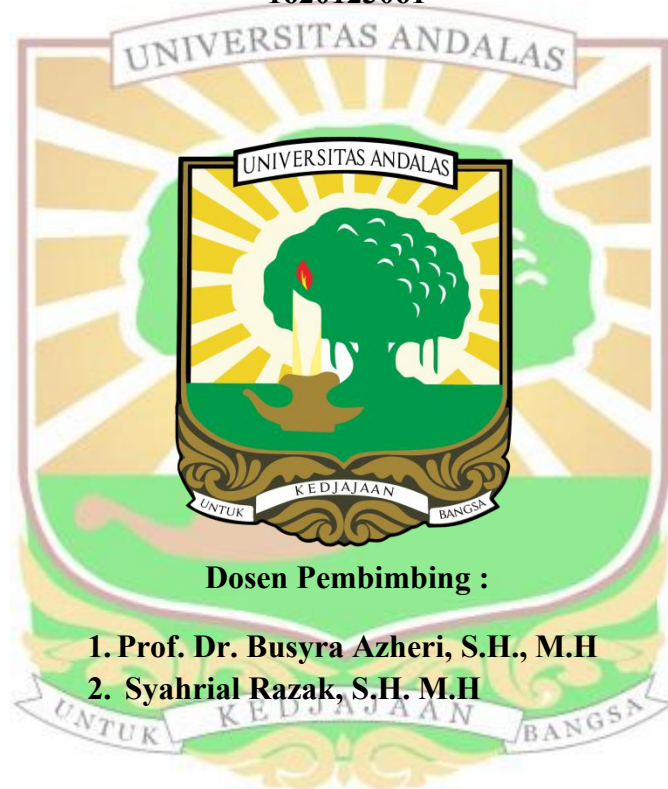


**PENGIKATAN BENDA JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA  
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT MULTINDO  
AUTO FINANCE DI KOTA PADANG**

**OLEH :**

**NURLIRISTIWA**

**1620123061**



**Dosen Pembimbing :**

- 1. Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H**
- 2. Syahril Razak, S.H. M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

# **PENGIKATAN BENDA JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT MULTINDO AUTO FINANCE DI KOTA PADANG**

**(Nurliristiwa, 1620123061, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 95 halaman)**

## **ABSTRAK**

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank memegang peranan penting. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga non bank yang berkembang pesat. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan yang sering ditemui. Lembaga pembiayaan dalam prakteknya menggunakan jaminan dalam pemberian pembiayaan. Pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur tidak selalu milik pribadi debitur, namun terdapat jaminan yang merupakan milik pihak ketiga yang diajukan sebagai jaminan. Wanprestasi merupakan salah satu resiko yang dapat terjadi selama perjanjian pembiayaan berlangsung dan pihak ketiga sebagai pemilik jaminan juga dapat merasakan dampak terhadap terjadinya wanprestasi. Pada perjanjian pembiayaan para pihak hanya terdiri dari kreditur dan debitur. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengikatan benda pihak ketiga sebagai jaminan dalam pembiayaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang benda kepemilikannya dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Penelitian dilakukan pada PT Multindo Auto Finance Kota Padang. Pengikatan terhadap benda milik pihak ketiga dilakukan dengan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan dan perjanjian pembiayaan hanya ditandatangani oleh kreditur dan debitur. Perlindungan hukum terhadap jaminan salah satunya melalui fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak diserahkan secara sukarela oleh debitur, maka harus mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan terhadap pemilik jaminan lainnya adalah memperpanjang masa waktu perjanjian pembiayaan.

**Kata Kunci:** *Pengikatan, Benda Jaminan, Perjanjian Pembiayaan.*

# **BINDING OF THIRD PARTY GUARANTEE OBJECTS IN FINANCING AGREEMENT IN PT MULTINDO AUTO FINANCE IN PADANG CITY**

**(Nurliristiwa, 1620123061, The Notary Masters Program, Faculty of Law, Andalas University, 95 pages)**

## **ABSTRACT**

Financial institutions both banks and non-banks play an important role. Financial Institutions is one non-bank institution that is developing rapidly. Consumer financing is one form of financing institutions that is often encountered. The financing institution in practice uses Guarantees provided by the debtor are not entirely the debtor's personal property, but are collateral which is the property of third parties submitted as collateral. Default is one that can occur during the ongoing financing and a third party as the owner of the Guarantee can also be made compared to an increase in default. In the financing agreement the parties only consist of creditors and debtors. The formulation of the problem in this return is how the binding of third parties as collateral in spending and how legal protection to third parties. The research method used is a sociological juridical method, namely discussing the problem by looking at applicable legal norms then discussing with legal facts that in the field. The study was conducted at PT Multindo Auto Finance Kota Padang. Binding of objects belonging to third parties is done with a letter of release of vehicle ownership rights and financing agreements are only signed by creditors and debtors. One of the legal protection for guarantees is through fiduciary. Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU / XVII / 2019 regarding the implementation of fiduciary executions that were not voluntarily approved by the debtor, the procedure must be carried out to execute a court decision with permanent legal force. Protection of the owner.

*Key words: Binding, Collateral Objects, Financing Agreement.*